

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan sebuah penelitian, penting kaitannya memberikan batasan pengertian yang relevan sebagai dasar dan arah penentuan yang lebih lanjut. Batasan pengertian tersebut disesuaikan berdasarkan ruang lingkup tema penelitian yang diangkat. Berikut penguraian mengenai batasan pengertian yang dimaksud akan dipaparkan dalam bab ini.

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Steers (1985:87) mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan

tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya (Kurniawan, 2005:109).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai, maka makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya menurut Georgopolous dan Tannembaum (1985:50) dalam mencapai sebuah efektivitas harus mempertimbangkan sasaran organisasi dan mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Istilah efektivitas ini erat kaitannya dengan upaya evaluasi. Efektivitas ini merupakan indikator penilaian suatu kegiatan yang mana menentukan adanya perubahan atau tidak terhadap bentuk dan manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Sumber daya yang dimaksud meliputi ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan

prosedur. Sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang dan interpretasi individu. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Jika ditemukan perencanaan yang tidak terealisasi, baik dalam hal pencapaian tujuan atau sasaran, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif. Berikut kriteria pengukuran efektivitas dalam pencapaian tujuan sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978:77) yakni:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai sebagai pedoman dan arah pelaksanaan
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dimana kebijakan mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- d. Perencanaan yang matang sebagai proyeksi pekerjaan di masa mendatang
- e. Penyusunan program yang tepat dengan beberapa penjabaran untuk mempermudah pelaksanaan
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja agar tercipta suasana kerja yang produktif
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- h. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

Pengukuran efektivitas tidak hanya dinilai dari segi hasil, melainkan juga dilihat dari perspektif maupun sikap seseorang (Robbins dalam Daryanto, 2010:57). Efektivitas ini pada dasarnya ialah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Dari beberapa pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Hal ini selaras dengan pendapat Julita (2015:4) yang mengatakan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan.

Selain dalam hal pencapaian tujuan, terdapat efektivitas organisasi yang secara tidak langsung turut berpengaruh pada pencapaian tujuan tersebut. Donnelly dalam menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Produksi merupakan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan mutu output sesuai dengan kebutuhan
- b. Efisiensi merupakan perbandingan (ratio) antara *output* dengan *input*
- c. Kepuasan merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
- d. Keunggulan adalah tingkat ketanggapan terhadap perubahan internal dan eksternal

- e. Pengembangan merupakan pengukuran kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

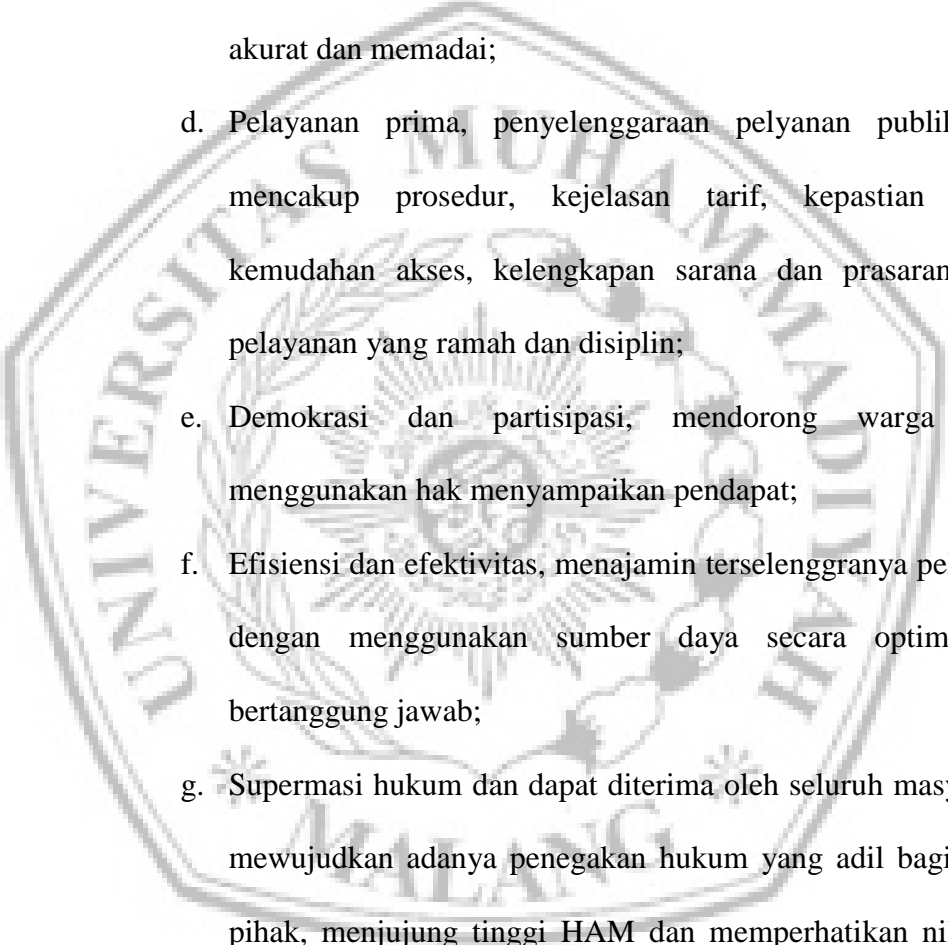
Dalam hal ini, efektivitas yang dimaksud ialah efektivitas transparansi pengelolaan anggaran daerah berbasis *online*. Pengukuran efektivitas ini didasarkan pada tujuan adanya transparansi anggaran, yakni tersampainya secara menyeluruh informasi pengelolaan anggaran publik oleh Pemerintah Kabupaten Blitar kepada masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah.

B. Transparansi APBD

1. Good governance dan Transparansi APBD

Good governance erat kaitanya dengan upaya pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah. IAIN & BPKP (2005:5) mendefinisikan *good governace* adalah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan. Adapun salah satu bentuk interaksi tersebut ialah pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam transparansi penyelenggaraan pemerintah yang didalamnya termasuk transparansi pengelolaan anggaran daerah. Sebagaimana yang termasuk dalam peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dalam Maryam (2016:5) yang menyebutkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut :

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau;

- 
- b. Akuntabilitas, meningkatkan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat;
 - c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;
 - d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin;
 - e. Demokrasi dan partisipasi, mendorong warga untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat;
 - f. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab;
 - g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* di atas, penelitian ini berfokus pada prinsip transparansi yang dilihat melalui penyampaian informasi seputar Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar. pemerintah daerah telah merancang sebuah *website*

khusus yang berisikan pengelolaan anggaran daerah yang akurat dan dapat diterima oleh masyarakat ataukah belum secara keseluruhan memuat informasi penganggaran Kabupaten Blitar.

2. Landasan Hukum dan Transparansi APBD

Didalam penyelenggaraan pemerintah tentunya terdapat payung hukum yang jelas dimana mengatur operasional dan teknis pelayanan. Ketetapan peraturan hukum tersebut digunakan sebagai landasan yang menentukan arah jalannya pelaksanaan satu program. Begitupun dengan upaya transparansi anggaran. Sebagaimana diinformasikan dalam *website* resmi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bahwa regulasi terkait pelaksanaan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah diantaranya ialah;

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aski Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi Tahun 2012;

- e. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah;
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
- h. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
- i. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Regulasi hukum tersebut tentunya juga melandasi penyelenggaraan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Blitar.

3. Tujuan Transparansi Anggaran

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa transparansi anggaran adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban penerima daerah dan pengeluaran daerah. adapun tujuan transparansi pengelolaan anggaran menurut Syafaratunisa (2015:28) adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial;
- b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi;

- c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan menggugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. Membangun kepercayaan semua pihak;
- e. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai *universal*.

Selanjutnya menurut Madiasmu dalam Simsom Werinom(2007:8), tujuan transparansi sistem pemberian informasi kepada publik.

C. ***E-GOVERNMENT***

1. **Definisi *e-government***

E-government dapat dipahami sebagai upaya pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi berperan sebagai alat dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Stevanus Wisnu Wijaya, 2007:10). Selanjutnya menurut Indrajit (2012) mengungkapkan *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Sedangkan menurut Sa'id bahwa *e-government* adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan pihak luar untuk meningkatkan *performance* pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan kualitas pemerintahan.

Berdasarkan definisi diatas, *e-government* merujuk kepada penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan atau lembaga publik. Diantara fungsi penerapannya adalah untuk meningkatkan produktivitas

kinerja pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab serta transparan kepada masyarakat. Dengan demikian akan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih baik dengan harapan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Secara umum *Electronic Government* didefinisikan sebagai pemerintahan elektronik (juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government*, atau *transformational government*) adalah teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Keuntungan yang diharapkan dari *elektronik government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan ICT (*information, communication and technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta sifatnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya.

Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru yaitu :

1. Government to Citizens (G-to-C)

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai potofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). G-to-C merupakan sktor pelayanan yang fokus pada kemampuan pemerintah dan warga negara untuk bertukar informasi satu sama lain dalam sebuah bentuk elektronik yang efisien.

2. *Government to Business* (G-to-B)

Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya.

3. *Government to Government* (G-to-G)

Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya untuk memperlancar kerjasama antar Negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarkat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-prosespolitik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebgainya.

4. *Government to Employees* (G-to-E)

Aplikasi *e-governemnt* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai neegri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat, Terdapat beberapa elemen sukses penentu keberhasilan penerapan *e-government* sebagaimana dikutip dari Indrajit (2004), yang menjabarkan empar elemen sukses berdasarkan hasil kajian dan riset dari Havard JFK school of Government.

2. Keuntungan penerapan *e-government*

E-government ditinjau dari sisi kegunaanya ialah untuk memudahkan penyampaian informasi diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya, penggunaan *e-government* dalam sektor publik memiliki beberapa keuntungan sebagaimana yang diuraikan oleh Arhami (2010-4), yakni sebagai berikut:

- a. Transparansi informasi dari pemerintah kepada publik akan sangat jelas. Masyarakat dapat dengan mudah mengikuti, memantau dan mengontrol perkembangan jalannya pemerintah.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada publik dalam segala hal. Pelayanan akan menjadi lebih cepat, tepat, dan terpercaya.
- c. Membangun dan menciptakan kepercayaan publik dan pemerintah. Oleh karena berbagai informasi kinerja pemerintah terpublikasikan denagn baik dan masyarakat dapat

mengaksesnya, maka tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah semakin tinggi.

- d. Meminimalisir korupsi dalam tubuh birokrasi.
- e. Mengurangi tingkat kesalahan dan duplikasi data melalui basis data yang terintegrasi dan jaringan *web* lainnya.
- f. Menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi.
- g. Meningkatkan kepuasan masyarakat terkait pengambilan keputusan serta menjadikan pemerintah lebih bertanggungjawab akan hal tersebut.

D. Model atau kerangka pengembangan

1. Indikator Pengembangan *e-government*

Pengembangan *e-government* tentu didasari dengan beberapa hal yang menjadi perhatian. Hasil riset dari Harvard Harvard JFK *school of Governmnet* (Indrajit, 2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitilalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah :

1) *Support*

Elemen *support* adalah elemen paling penting dalam pengembangan *e-government* dapat diterapkan, tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat terlaksana.

2) *Capacity*

Elemen *capacity* merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan *e-government* agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat sumber daya yang harus dimiliki, yaitu :

- a) Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*.
- b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-government*,
- c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

3) *Value*

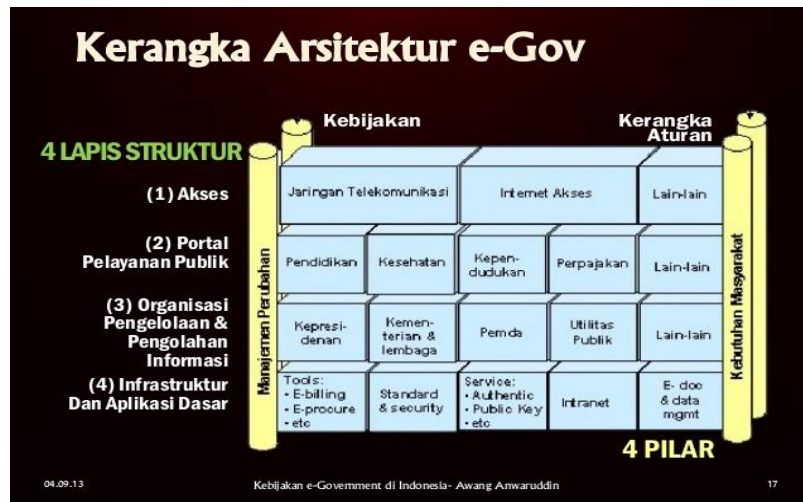
Elemen *value* berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan jua masyarakat sebagai penerima pelayanan *e-government*. Dalam elemen *value* yang menentukan besar tidaknya manfaat *e-government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan.

2. Kerangka Arsitektur *E-governemnt*

Kerangka arsitektur pengembangan *e-government* terdiri dari empat struktur yakni:

- 1) Akses Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
- 2) Portal pelayanan publik. Situs web Pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
- 3) Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi. Organisasi pendukung (*back office*) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi dan dokumen *elektronik*.
- 4) Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya. (Buku Panduan Penyelenggaraan situs pemerintah Daerah, Depkominfo, 2003)

Kerangka arsitektur *e-government* di atas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



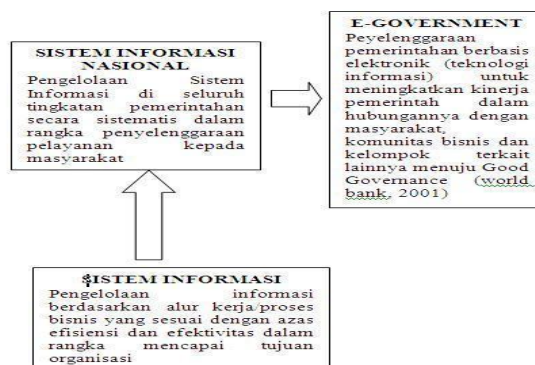
Gambar 2.1 Kerangka Arsitektur E-Government

Sumber : <http://slideplayerinfo.com>

Dalam pengembangan *e-government* ini sejatinya sangat ditentukan oleh tingkat kesiapan pemerintah serta kebutuhan masyarakat. Kesiapan pemerintah meliputi ketersediaan sumber daya pengelola *e-government*, anggaran, serta kebijakan sebagai landasan dasar. Adapun dari sisi masyarakat, pelaksanaan *e-government* ini dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik.

3. Kerangka Pengembangan E-Government di Indonesia

Kerangka pengembangan *e-government* di Indonesia mnegacu pada kerangka Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) berikut



Gambar 2.2 Kerangka Sisfonas Dan *E-government*

Sumber: kemendag.go.id

Gambar diatas menjelaskan bahwa Sistem Informasi merupakan bentuk aplikasi pada masing-masing instansi pemerintah. Secara bertahap sistem informasi ini dipadukan menjadi sistem informasi nasional yang saling bersinergi dan pada akhirnya terwujud interaksi G2G, G2B, dan G2C.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan menerapkan *e-government* antara lain ialah: (1) menurunkan biaya administrasi; (2) meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada ekonomi tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana untuk menyalurkan maupun balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut. Berbagai manfaat tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan pemerintahan secara umum.

Lebih lanjut mengenai *e-government*, terdapat beberapa tahapan dalam pengembagannya. Menurut *center for Democracy and Technology dan infodev*, proses implementasi *e-governemnt* terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tahapan tersebut harus di lakukan secara berurutan dan masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari *e-governemnt*. Adapun ketiga tahapan tersebut antara lain:

- 1) ***Publish***, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah, misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.
- 2) ***Internet***, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antarmuka yang terhubung dengan lembaga lain.
- 3) ***Transact***, yaitu menyediakan layanan pemerintah secara online, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

E. Efektivitas *E-government*

Tujuan dari penerapan *e-government* ialah memudahkan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Salah satu hal yang menjadi latar belakang diterapkannya *e-government* yakni untuk meningkatkan pelayanan publik. Untuk mengukur efektivitas dari penerapan *e-government*, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur yakni sebagai berikut.

No	Indikator	Keselarasan dengan <i>e-government</i>
----	-----------	--

1	Arah pemanfaatan teknologi informasi	Berorientasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik
2	Keberhasilan penerapan TI	Diukur berdasarkan kepuasan pengguna
3	Pengembangan SDM	Diukur berdasarkan kebutuhan pelayanan publik
4	Prosedur dan aturan	Jelas dan mampu mengakomodasi kebutuhan layanan publik
5	Model Kepemimpinan	Mengarah pada ketaatan terhadap aturan tanpa menomorduakan pelayanan terhadap konsumen

Tabel 2.1 Indikator dan efektivitas *E-governemnt*.

Sumber:sideshare.net

Berdasarkan tabel diatas diperoleh beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penerapane-government. Begitupun dengan penerapan *website* transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Blitar. *website* tersebut merupakan salah satu cerminan *e-government*. Maka dari itu penelitian ini akan membahas efektivitas pemanfaatan *website* tersebut terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan pengelolaan anggaran daerah.